



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693110/2025**



DS:4566-5822-9720-9582

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 01**

Tanggal : 21 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
  2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
  3. Provinsi : (25) PAPUA
  4. Kode>Nama Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
- Sebesar : Rp. 1.028.416.000 ( SATU MILIAR DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.028.416.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 1.028.416.000

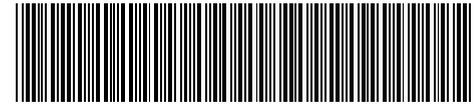
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025**



DS:4566-5822-9720-9582

Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

---

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	128.825.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	128.825.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	899.591.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	899.591.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			128.825.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah			128.825.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	73.824.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	73.824.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	55.001.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	55.001.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			899.591.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			899.591.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4,00	Lembaga	81.667.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	4,00	Lembaga	81.667.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	108.546.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	75.653.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	32.893.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : I A. 2

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat

Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1,00	Orang	44.254.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah		1,00	Orang	44.254.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga	40.134.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		6,00	Lembaga	40.134.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	58.440.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1,00	dokumen	58.440.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	43.860.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum		1,00	Laporan	43.860.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		56,00	Orang	448.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)		56,00	Orang	448.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat	74.690.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)		7,00	Kelompok Masyarakat	74.690.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693110	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	-	1.028.416	-	-	-	1.028.416		
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	128.825	-	-	-	128.825		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	128.825	-	-	-	128.825		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	73.824	-	-	-	73.824	25 . 51	
01	RM	-	73.824	-	-	-	73.824	063@	
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	55.001	-	-	-	55.001	25 . 51	
01	RM	-	55.001	-	-	-	55.001	063@	
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	899.591	-	-	-	899.591		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	899.591	-	-	-	899.591		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	81.667	-	-	-	81.667	25 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	81.667	-	-	-	81.667	063@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	108.546	-	-	-	108.546	25 . 51	
01 RM		-	108.546	-	-	-	108.546	063@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	44.254	-	-	-	44.254	25 . 51	
01 RM		-	44.254	-	-	-	44.254	063@	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	40.134	-	-	-	40.134	25 . 51	
01 RM		-	40.134	-	-	-	40.134	063@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	58.440	-	-	-	58.440	25 . 51	
01 RM		-	58.440	-	-	-	58.440	063@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	43.860	-	-	-	43.860	25 . 51	
01	RM	-	43.860	-	-	-	43.860	063@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	448.000	-	-	-	448.000	25 . 51	
01	RM	-	448.000	-	-	-	448.000	063@	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	74.690	-	-	-	74.690	25 . 51	
01	RM	-	74.690	-	-	-	74.690	063@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.028.416</b>	-	-	-	<b>1.028.416</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (693110) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

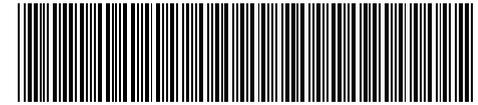
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693110	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	75.869	82.897	83.497	75.569	93.557	97.199	98.669	86.227	75.569	97.199	86.278	75.884	1.028.416
		<b>BELANJA BARANG</b>	75.869	82.897	83.497	75.569	93.557	97.199	98.669	86.227	75.569	97.199	86.278	75.884	1.028.416
135.11.BB.7133		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	6.923	14.251	14.251	6.923	14.253	6.923	30.023	6.923	6.923	6.923	6.923	7.586	128.825
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	6.923	14.251	14.251	6.923	14.253	6.923	30.023	6.923	6.923	6.923	6.923	7.586	128.825
135.11.BF.7136		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	68.946	68.646	69.246	68.646	79.304	90.276	68.646	79.304	68.646	90.276	79.355	68.298	899.591
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	68.946	68.646	69.246	68.646	79.304	90.276	68.646	79.304	68.646	90.276	79.355	68.298	899.591

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [693110] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>693110</b>	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.700
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 767.570		Efisiensi Anggaran
	52 Belanja Barang Rp. 767.570		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>135.11.BB</b>	<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>524113</b>	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
<b>7133</b>	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000
<b>7133.ABD</b>	<b>Kebijakan Bidang Hukum dan HAM</b>		Efisiensi Anggaran
	521211 Belanja Bahan(RM)	<b>135.11.BF</b>	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.544	<b>7136</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>
	Efisiensi Anggaran	<b>7136.BDB</b>	<b>Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah</b>
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.729
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.380		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.500		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.319
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
<b>7133.BDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.250
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.301		Efisiensi Anggaran
	Efisiensi Anggaran		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.369
			Efisiensi Anggaran

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
IV A. B L O K I R**



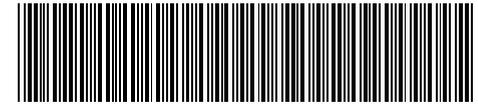
DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [693110] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.A. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>7136.BDD</b>	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	<b>7136.BIC</b>	Efisiensi Anggaran
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.717		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400
	Efisiensi Anggaran		Efisiensi Anggaran
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000		521211 Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi Anggaran		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.185
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Anggaran
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Efisiensi Anggaran	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.649		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Efisiensi Anggaran		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.279	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Efisiensi Anggaran	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Efisiensi Anggaran		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.550	<b>Data dan Informasi Publik</b>		
Efisiensi Anggaran	521211 Belanja Bahan(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600		
<b>7136.BIB</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</b>	Efisiensi Anggaran	
521211 Belanja Bahan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.850	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.850	Efisiensi Anggaran	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
Efisiensi Anggaran	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.840	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Efisiensi Anggaran	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.004	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.004			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [693110] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.A. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>7136.FAE</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 600 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 27.510 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 750 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>7136.QBA</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 331.154 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
<b>7136.QBC</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat</b>		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Efisiensi Anggaran Rp. 55.690 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693110/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:4566-5822-9720-9582

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [693110] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001